

**PERAN GKE BETANG KAHANJAK DALAM MEMBANGUN
KESADARAN POLITIK JEMAAT DI KOTA PALANGKA
RAYA: TINJAUAN TEOLOGI POLITIK**

SKRIPSI



**Oleh
JOSEPH NOVAN
1902120812**

**PROGRAM STUDI TEOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
2026**

**PERAN GKE BETANG KAHANJAK DALAM MEMBANGUN
KESADARAN POLITIK JEMAAT DI KOTA PALANGKA
RAYA: TINJAUAN TEOLOGI POLITIK**

SKRIPSI



**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen
Program Studi Teologi S1 Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S.Th**

**Oleh
JOSEPH NOVAN
1902120812**

**PROGRAM STUDI TEOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Jemaat di Kota Palangka Raya: Tinjauan Teologi Politik
Nama : Joseph Novan
NIM : 1902120812
Program Studi : Teologi
Jurusan : Ilmu Keagamaan Kristen
Fakultas : Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Lianto, M.Th
NIP. 19820126 200901 1 013

Sharon Michelle O Pattiasina, S.Si., Teol., M.Si
NIP. 19951013 202203 2 006

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen

Lianto, M.Th
NIP. 19820126 200901 1 013

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Jemaat di Kota Palangka Raya: Tinjauan Teologi Politik

Nama : Joseph Novan

NIM : 1902120812

Program Studi : Teologi

Jurusan : Ilmu Keagamaan Kristen

Fakultas : Ilmu Sosial dan Keagamaan Kristen

TIM PENGUJI

1.	Pribadyo Prakosa, S.Si.M.Si.,Teol NIP. 19850625 200901 1 011	(.....)	Ketua
2.	<u>Lianto, M.Th</u> NIP. 19820126 200901 1 013	(.....)	Anggota I
3.	<u>Sharon Michelle O Pattiasina, S.Si., Teol., M.Si</u> NIP. 19951013 202203 2 006	(.....)	Anggota II
4.	Ebariani, M.Th NIP. 19740111 202321 2 004	(.....)	Anggota III

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen

Stynie Nova Tumbol, S.Si. Teol., M.Th
NIP. 19720825 200604 2 003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JOSEPH NOVAN
NIM : 1902120812
Program Studi : Teologi
Judul Skripsi : Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Jemaat di Kota Palangka Raya: Tinjauan Teologi Politik
Pembimbing : 1. Lianto, M.Th
2. Sharon Michelle O Pattiasina, S.Si., Teol., M.Si

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, IAKN Palangka Raya maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi saya ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali atas arahan Tim Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis/skripsi saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali pendapat/kutipan secara tertulis yang berasal dari referensi dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, IAKN Palangka Raya.

Palangka Raya, Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan

JOSEPH NOVAN
1902120812

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto:

“Iman yang sejati bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan melalui tanggung jawab, keadilan, dan kasih dalam kehidupan bermasyarakat.”

“Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut TUHAN dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?” Mikha 6:8

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, dan anugerah-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat, kekuatan, dan pengharapan dalam setiap perjalanan hidup saya.
2. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material, serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doa.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teologi Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen IAKN Palangka Raya yang telah membimbing dan membagikan ilmu selama masa perkuliahan.
5. GKE Betang Kahanjak Kota Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teologi yang telah memberikan semangat, bantuan, serta kebersamaan selama menempuh pendidikan.
7. Almamater tercinta, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih, penyertaan, hikmat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Jemaat di Kota Palangka Raya: Tinjauan Teologi Politik" sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teologi pada Program Studi Teologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Telhalia, M.Th., D.Th., selaku Rektor Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya beserta seluruh jajaran pimpinan.
2. Ibu Stynie Nova Tumbol, S.Si. Teol., M.Th., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen beserta seluruh civitas akademika.
3. Bapak Lianto, M.Th., selaku Ketua Jurusan Ilmu Keagamaan Kristen sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi, kritik, dan saran selama proses penyusunan skripsi.
4. Ibu Sharon Michelle O Pattiasina, S.Si., Teol., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan perhatian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh dosen Program Studi Teologi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
6. Pendeta, Penatua, Diakon, dan seluruh Jemaat GKE Betang Kahanjak Kota Palangka Raya yang telah menerima serta membantu penulis selama proses penelitian berlangsung.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, serta dukungan tanpa henti.

8. Sahabat, teman-teman seperjuangan, dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu teologi dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih karunia, penyertaan, hikmat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Jemaat di Kota Palangka Raya: Tinjauan Teologi Politik” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Teologi (S.Th.) pada Program Studi Teologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran gereja dalam membangun kesadaran politik jemaat melalui pendekatan Teologi Politik. Gereja tidak hanya dipanggil untuk melaksanakan pelayanan spiritual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan profetik dalam membimbing jemaat agar mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara bijaksana, etis, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai iman Kristen.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Teologi Politik, serta menjadi bahan referensi bagi gereja, akademisi, mahasiswa, dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap hubungan gereja dan kehidupan politik dalam masyarakat.

Palangka Raya, Juni 2026

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran gereja dalam membangun kesadaran politik jemaat berdasarkan nilai-nilai iman Kristen tanpa terlibat dalam politik praktis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman GKE Betang Kahanjak tentang politik dalam perspektif Teologi Politik, menganalisis peran gereja dalam membangun kesadaran politik jemaat, serta mendeskripsikan implementasi Teologi Politik dalam pembinaan jemaat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif di GKE Betang Kahanjak Kota Palangka Raya. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pendeta, penatua/diakon, serta jemaat, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja memandang politik sebagai bagian dari tanggung jawab iman Kristen. Kesadaran politik jemaat dibangun melalui khotbah, pembinaan, persekutuan, dan pengajaran etika Kristen, dengan tetap menjaga netralitas terhadap politik praktis. Implementasi Teologi Politik diwujudkan melalui fungsi profetik dan edukatif yang membentuk karakter moral, tanggung jawab sosial, serta partisipasi politik jemaat yang etis dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: gereja, jemaat, kesadaran politik, politik, teologi politik

This study is motivated by the important role of the church in fostering the political awareness of its congregation based on Christian values without engaging in practical politics. The study aims to describe the understanding of politics at GKE Betang Kahanjak from the perspective of Political Theology, analyze the church's role in developing political awareness among its congregation, and describe the implementation of Political Theology in congregational development. This research employed a descriptive qualitative approach at GKE Betang Kahanjak, Palangka Raya. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving pastors, elders/deacons, and congregation members, and were analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that the church views politics as part of Christian faith and responsibility. Political awareness is fostered through sermons, pastoral guidance, fellowship, and Christian ethics education while maintaining neutrality toward practical politics. Political Theology is implemented through prophetic and educational functions that promote moral character, social responsibility, and ethical political participation.

Keywords: church, congregation, political awareness, politics, political theology

DAFTAR ISI

PERAN GKE BETANG KAHANJAK DALAM MEMBANGUN.....	i
PERAN GKE BETANG KAHANJAK DALAM MEMBANGUN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO & PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	9
E. BATASAN MASALAH	10
F. ALASAN PEMILIHAN JUDUL	10
G. DEFINISI ISTILAH	11
H. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II	14
KAJIAN PUSTAKA	14
A. TEOLOGI POLITIK	14
1. Johann Baptist Metz	14
2. Jorgen Moltmann.....	16
3. Stanley Hauerwas	19
B. <i>CIVIL RELIGION</i>	23
C. PERAN GEREJA DALAM POLITIK	31
Gereja sebagai lembaga keagamaan tidak hanya memiliki fungsi spiritual, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Peran gereja meluas ke ranah sosial dan politik, tidak dalam bentuk politik praktis, tetapi lebih pada penguatan nilai moral dan etika dalam kehidupan publik. Gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian (<i>prophetic voice</i>) dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian.	
1. Fungsi Gereja dalam Masyarakat	31
2. Peran Gereja dalam Politik.....	32

3. Fungsi Profetik Gereja.....	34
D. PENELITIAN TERDAHULU	36
E. KERANGKA BERPIKIR	39
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
A. PENDEKATAN PENELITIAN	43
B. JENIS PENELITIAN	43
C. LOKASI PENELITIAN	44
D. WAKTU PENELITIAN	44
E. SUMBER DATA PENELITIAN	45
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	47
G. TEKNIK ANALISIS DATA	49
BAB IV	53
HASIL PENELITIAN	53
A. PROFIL GKE BETANG KAHANJAK	53
B. HASIL PENELITIAN	54
C. PEMBAHASAN.....	61
1. Netralitas GKE Betang Kahanjak dalam Perspektif Teologi Politik....	Error!
Bookmark not defined.	
BAB V	71
PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN-SARAN.....	72
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	37
Tabel 2. Waktu Penelitian	45
Tabel 3. Jumlah Informan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	42
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem demokrasi Indonesia, partisipasi warga negara dalam kehidupan politik merupakan bagian integral dari tanggung jawab kebangsaan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). Keterlibatan umat beragama dalam ruang publik bukanlah sesuatu yang terpisah dari iman, melainkan bagian dari panggilan untuk menghadirkan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama.¹

Data Daftar Calon Tetap (DCT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya menunjukkan adanya sejumlah calon legislatif beragama Kristen yang mencalonkan diri pada Daerah Pemilihan (Dapil) 2. Fakta ini menunjukkan bahwa umat Kristen secara individual turut terlibat dalam proses politik formal. Berdasarkan data yang diperoleh, di daerah pemilihan (Dapil) Kota Palangka Raya 2 terdapat 64 calon legislatif yang beragama Kristen dari berbagai partai politik.² Kehadiran mereka menunjukkan bahwa umat Kristen juga turut berperan dalam

¹ Ngelow, Z. J. (2014). *Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama: Peran Gereja dalam Politik di Indonesia*. Jurnal Jaffray, 12(2), 213–234.

² Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2025). *Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD*. Diakses pada 5 Maret 2025, dari https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dprd.

dinamika politik lokal, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Fakta ini menunjukkan bahwa gereja memiliki peran penting dalam membimbing jemaat agar dapat memahami politik dengan bijak serta memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting: jika umat Kristen terlibat dalam politik sebagai individu, bagaimana posisi dan peran gereja sebagai institusi dalam dinamika tersebut? Apakah gereja hanya menjadi penonton, atau memiliki peran edukatif dan profetik dalam membentuk kesadaran politik jemaat?

Hubungan antara politik dan gereja telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah. Politik adalah bagian dari kehidupan sosial yang tidak terpisahkan dari umat manusia, sementara gereja merupakan lembaga yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk moral dan etika masyarakat.³ Dalam sejarah, gereja sering kali berperan aktif dalam dinamika politik, baik sebagai penggerak perubahan sosial maupun sebagai institusi yang memberikan pandangan etis terhadap kebijakan pemerintah. Menurut Zakaria J. Ngelow, politik yang sesuai dengan iman Kristen bukanlah politik kekuasaan atau kepentingan pribadi, melainkan “politik kerahiman” (*compassionate politics*), yakni politik yang berpihak kepada mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir.⁴ Oleh karena itu

³ Zakaria J. Ngelow, *Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama – Peran Gereja dalam Politik di Indonesia*, Jurnal Jaffray 12, No. 2 (2014): 214.

⁴ Zakaria J. Ngelow, *Turut Membina Indonesia*, 214.

dalam perspektif ini, politik dipahami sebagai wujud praksis iman yang menghadirkan kasih Allah dalam struktur sosial dan kebijakan publik. Dengan demikian, gereja tidak dapat bersikap apatis terhadap realitas politik, sebab panggilan iman mengandung dimensi sosial dan publik.

Dalam konteks kehidupan Kristiani, iman tidak hanya direfleksikan dalam kehidupan spiritual, tetapi juga dalam tindakan nyata di tengah masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Gereja memiliki tanggung jawab profetik untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ferdinanda dan Supratikno, gereja dapat memainkan peran penting dalam membimbing jemaat agar memiliki kesadaran politik yang benar, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab.⁵ Selain itu, peran gereja juga dapat terlihat dalam upayanya membangun harmoni sosial serta mendukung kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat luas. Dengan demikian, gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat edukasi tentang politik yang membangun karakter dan integritas jemaatnya.

Peran gereja dalam kehidupan sosial-politik sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Gereja juga memiliki tanggung jawab dalam

⁵ Marfan Ferdinanda Tahamata dan Agus Supratikno, *Peran Politik Gereja dalam Tahun Politik 2024: Studi Kasus GKI Serpong*, Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan 13, No. 2 (2024): 227.

membimbing dan membentuk perspektif etis umat Kristiani terhadap politik. Dalam realitas yang ada, gereja dan jemaat sering kali ikut serta dalam politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak jarang jemaat sebuah gereja mencalonkan diri sebagai calon legislatif, bahkan dalam beberapa kasus, seorang pendeta pun turut mencalonkan diri. Keterlibatan gereja dalam politik merupakan dilema tersendiri, di satu sisi ada yang menolak keterlibatan politik dalam gereja, sementara di sisi lain ada yang menganggap bahwa umat Kristen sebagai warga negara harus berperan aktif dalam politik, tentunya dengan tetap menjunjung tinggi prinsip sebagai “garam dan terang dunia” (Matius 5:13-14).⁶ Sebagai institusi yang hadir di tengah masyarakat, gereja memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik yang sehat. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi ruang edukasi politik bagi jemaatnya. Melalui khotbah, gereja dapat menanamkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendeta dan pemimpin gereja memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan yang membangun kesadaran politik yang bertanggung jawab, seperti pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, kepedulian terhadap kebijakan publik, serta menjaga persatuan dalam keberagaman.⁷

⁶ David Ming, *Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan yang Baik di Indonesia*, Jurnal Kadesi 3, No. 2 (2021): 93.

⁷ Ibid

Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Betang Kahanjak merupakan salah satu gereja yang memiliki peran signifikan dalam konteks politik di Kota Palangka Raya, terutama dalam mempromosikan nilai-nilai kebangsaan dan mendorong partisipasi aktif jemaat dalam pembangunan masyarakat. Meskipun GKE Betang Kahanjak secara historis merupakan gereja yang berbasis etnis Dayak, gereja ini tetap terbuka bagi jemaat dari berbagai latar belakang suku dan budaya.⁸ Sikap inklusif ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berperan dalam pembinaan iman, tetapi juga dalam menciptakan ruang dialog yang harmonis di tengah keberagaman serta memperkuat kehidupan sosial yang dilandasi nilai-nilai toleransi, keadilan, dan persaudaraan.⁹ Hal ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan toleransi yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, peran gereja dalam politik bukan berarti terlibat dalam praktik politik praktis atau mendukung kelompok tertentu, melainkan lebih kepada pemberdayaan jemaat agar memiliki kesadaran politik yang baik, kritis terhadap kebijakan publik, dan aktif dalam menjaga persatuan serta kesejahteraan masyarakat.

GKE Betang Kahanjak awalnya merupakan bagian dari GKE Agape, yang terletak di Jalan Yogyakarta. Pada awalnya, tempat ibadah

⁸ Hasil wawancara

⁹ Walean, J. (2021). *Gereja dalam Keragaman dan Keharmonisan: Studi Sosioteologis Merawat Kerukunan Hidup Beragama*. Magnum Opus, 2(2), 145–160.

ini hanya digunakan untuk sekolah minggu dan kegiatan ibadah lainnya bagi anak-anak. Seiring dengan berkembangnya jemaat, tempat ini kemudian ditetapkan sebagai calon jemaat GKE Betang Kahanjak, hingga akhirnya berdiri sebagai gereja yang mandiri. Perkembangan GKE Betang Kahanjak tidak terlepas dari keterlibatan jemaat dan pendeta dalam kehidupan sosial dan politik. Salah satu bentuk peran jemaat dalam politik adalah keterlibatan mereka dalam mengawasi serta memastikan jalannya pemilu yang jujur, bersih, dan adil.

Berdasarkan hasil observasi awal, beberapa anggota jemaat aktif dalam kepanitiaan pemilu, baik sebagai pengawas maupun sebagai petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, hingga saat ini, tidak ada jemaat yang secara langsung terlibat sebagai bagian dari tim sukses calon legislatif maupun eksekutif, baik sebagai simpatisan maupun sebagai relawan dalam kampanye politik. Gereja secara institusional tetap menjaga netralitasnya dengan tidak memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Sikap ini tercermin dalam kebijakan gereja yang menekankan pentingnya jemaat untuk menggunakan hak pilihnya secara bijaksana tanpa intervensi dari gereja sebagai lembaga keagamaan. Bahkan, dalam beberapa ibadah, pendeta dan pemimpin jemaat sering kali mengimbau agar jemaat tidak terjebak dalam politik praktis yang dapat memecah belah persatuan di dalam gereja.

Di sisi lain, pengaruh gereja dalam dinamika politik lokal masih terbatas. Misalnya, dalam pemilihan ketua RT atau musyawarah

kelurahan, partisipasi jemaat belum begitu terlihat. Gereja juga belum banyak berkontribusi dalam advokasi kebijakan sosial atau pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya kesadaran politik di kalangan jemaat, kurangnya inisiatif gereja dalam mendorong diskusi politik yang sehat, serta adanya kekhawatiran bahwa keterlibatan gereja dalam politik dapat menimbulkan perpecahan di antara jemaat. Meskipun demikian, dalam beberapa kesempatan, gereja telah menunjukkan perannya sebagai mediator dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah perbedaan politik. Misalnya, dalam pemilu 2024, beberapa tokoh gereja turut mengimbau jemaat agar tidak terprovokasi oleh isu-isu politik yang berpotensi memecah belah persatuan di lingkungan gereja dan masyarakat. Melalui khotbah dan pertemuan jemaat, para pemimpin gereja menekankan pentingnya partisipasi politik yang etis dan bertanggung jawab sebagai bentuk implementasi iman Kristen dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan pengamatan awal tersebut, dapat dilihat bahwa GKE Betang Kahanjak menegaskan sikap tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak memberikan dukungan kepada calon atau partai tertentu. Namun di sisi lain, gereja tetap memberikan arahan moral dan imbauan agar jemaat menggunakan hak pilih secara bijaksana. Dalam penelitian ini terdapat kesenjangan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, yakni netralitas gereja sebagai institusi dapat menjalankan peran profetik dan

edukatif dalam membangun kesadaran jemaat tentang politik. Dalam hal ini, sikap netralitas gereja dapat menjadi bentuk tanggung jawab teologis secara berjemaat dan bermasyarakat.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengangkat persoalan mengenai peran gereja dalam politik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam peran GKE Betang Kahanjak dalam konteks politik di Kota Palangka Raya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemahaman GKE Betang Kahanjak tentang politik dalam perspektif Teologi Politik?
2. Bagaimana peran GKE Betang Kahanjak dalam membangun kesadaran politik warga jemaat?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan pemahaman GKE Betang Kahanjak tentang politik dalam perspektif Teologi Politik.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis peran GKE Betang Kahanjak dalam membangun kesadaran politik warga jemaat.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan akademik mengenai peran GKE Betang Kahanjak dalam politik, khususnya dalam konteks gereja dan masyarakat di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi di bidang teologi politik, terutama dalam kajian tentang keterlibatan gereja dalam ranah politik dan bagaimana gereja dapat menjalankan perannya secara etis dan bertanggung jawab.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi jemaat GKE Betang Kahanjak dalam memahami peran mereka sebagai warga gereja dan warga negara. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan jemaat dapat memahami batasan yang harus dijaga agar tidak terjadi konflik kepentingan antara tugas gereja sebagai lembaga spiritual dan keterlibatan dalam politik praktis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi gereja dalam bersikap dan mengambil keputusan terkait peran sosial-politikanya, sehingga gereja dapat berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat secara lebih bijaksana dan etis.

E. BATASAN MASALAH

Penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada identifikasi peran GKE Betang Kahanjak dalam politik, dengan fokus pada keterlibatan jemaat dalam praktik politik. Penelitian ini tidak akan membahas aspek politik praktis secara luas, melainkan akan menelaah bagaimana jemaat GKE Betang Kahanjak berpartisipasi dalam politik serta bagaimana gereja sebagai institusi memposisikan dirinya dalam dinamika politik di Kota Palangka Raya.

F. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Judul “Peran GKE Betang Kahanjak dalam Berpolitik di Kota Palangka Raya” dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana gereja, sebagai institusi keagamaan, berperan dalam kehidupan politik, khususnya di Kota Palangka Raya. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki pengaruh dalam membentuk kesadaran politik jemaatnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi sejauh mana keterlibatan GKE Betang Kahanjak dalam politik, baik melalui edukasi politik bagi jemaat maupun melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan sosial-politik.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana gereja dapat berperan secara etis dalam politik tanpa melanggar prinsip-prinsip spiritualitasnya. Melalui metode

wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi, penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika hubungan antara gereja dan politik dalam konteks lokal. Lokasi penelitian difokuskan di GKE Betang Kahanjak, yang terletak di Jalan Yogyakarta, sebagai objek utama penelitian.

G. DEFINISI ISTILAH

1. Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status dalam masyarakat. Peran mencerminkan hak dan kewajiban yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu lingkungan sosial. Seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajibannya berarti telah menjalankan suatu peran dengan baik.
2. Gereja adalah komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan komunitas ini tidak dapat terpisah dari masyarakat.
3. Politik adalah proses interaksi antara individu atau kelompok dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Politik mencakup berbagai aspek, termasuk pengambilan kebijakan, distribusi kekuasaan, serta dinamika sosial dalam suatu masyarakat atau organisasi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama ini berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, alasan pemilihan judul, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kerangka Teoritis

Bab ini berisi kajian teori dan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian mengenai peran GKE Betang Kahanjak dalam politik. Dalam bab ini, akan dibahas teori-teori yang menjadi dasar penelitian serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang cara penelitian dilakukan serta prosedur yang digunakan dalam pengolahan data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ke empat ini menyajikan hasil-hasil penelitian yang diperoleh serta menganalisis dan membahas temuan-temuan

yang didapatkan dalam konteks teori yang telah dipaparkan sebelumnya.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir memuat kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan dan memberikan saran-saran yang relevan untuk gereja agar dapat mengambil keputusan yang bijaksana terkait kegiatan politik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TEOLOGI POLITIK

1. Johann Baptist Metz

Johann Baptist Metz (1928–2019) merupakan teolog Katolik asal Jerman yang dikenal sebagai penggagas Teologi Politik modern. Pemikirannya lahir dari keprihatinan terhadap kecenderungan agama yang hanya berfokus pada keselamatan pribadi dan mengabaikan persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Menurut Metz, iman Kristen tidak pernah terlepas dari konteks kehidupan manusia, sehingga iman harus diwujudkan dalam keterlibatan nyata terhadap berbagai persoalan sosial, politik, dan kemanusiaan. Ia menolak privatisasi agama yang menjadikan gereja hanya berkutat pada urusan ritual, sebab iman Kristen memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan, solidaritas, dan pembebasan bagi mereka yang mengalami penderitaan.¹⁰

Bagi Metz, salah satu tugas utama gereja adalah membangun solidaritas dengan mereka yang tertindas dan menderita. Ia menegaskan bahwa gereja tidak boleh bersikap netral terhadap ketidakadilan sosial,

¹⁰ Edwardus Renaldus Jawa, *Teologi Politik Menurut Pandangan Johann Baptist Metz* (Ende: Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, 2024), 2–5.

melainkan harus hadir sebagai suara profetis yang membela kaum lemah. Konsep compassion (belas kasih) menjadi inti dari teologi politiknya, yaitu kemampuan untuk menyadari, merasakan, dan merespons penderitaan orang lain melalui tindakan nyata. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk terlibat dalam upaya transformasi sosial dengan memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama.¹¹

Metz juga menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjadi subjek dalam kehidupan sosial dan politik. Teologi politik tidak hanya berbicara tentang relasi antara gereja dan negara, tetapi juga tentang bagaimana iman mendorong setiap orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan publik. Dalam pandangannya, keterlibatan sosial dan politik merupakan wujud tanggung jawab iman yang berakar pada solidaritas Allah terhadap manusia melalui peristiwa inkarnasi. Karena itu, gereja perlu membangun kesadaran kritis jemaat agar mampu mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan serta kemanusiaan.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa iman Kristen tidak boleh dipahami hanya sebagai urusan pribadi dan spiritual, tetapi harus diwujudkan dalam keterlibatan nyata terhadap persoalan-

¹¹ Edwardus Renaldus Jawa, *Teologi Politik Menurut Pandangan Johann Baptist Metz*, 5–6.

¹² Edwardus Renaldus Jawa, *Teologi Politik Menurut Pandangan Johann Baptist Metz*, 4–6.

persoalan sosial dan politik. Gereja dipanggil untuk hadir di tengah penderitaan manusia sebagai bentuk solidaritas terhadap mereka yang tertindas, terpinggirkan, dan mengalami ketidakadilan. Melalui Teologi Politik, Metz menempatkan gereja sebagai agen transformasi sosial yang berani bersikap kritis terhadap berbagai bentuk penindasan demi mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan kehendak Allah.

Pemikiran Metz relevan dengan penelitian ini karena menempatkan gereja sebagai komunitas iman yang tidak hanya melayani kebutuhan spiritual jemaat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial-politik dalam membangun kesadaran, partisipasi, dan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Melalui perspektif teologi politik Metz, peran GKE Betang Kahanjak dapat dipahami sebagai upaya gereja dalam membentuk jemaat yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga gereja sekaligus warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik.¹³

2. Jurgen Moltmann

Jurgen Moltmann merupakan salah satu teolog Protestan Jerman yang berpengaruh pada abad ke-20. Pemikirannya berkembang dalam konteks Eropa pasca Perang Dunia yang ditandai oleh krisis kemanusiaan, penderitaan, dan runtuhnya berbagai nilai yang

¹³ Naila Dwinanda Oktaviani et al., "Teologi Politik: Sejarah, Kontroversi, dan Relevansinya di Dunia Kontemporer," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 3 (2025): 5.

sebelumnya dianggap mapan. Situasi tersebut mendorong Moltmann mengembangkan Teologi Pengharapan (*Theology of Hope*), yaitu suatu pemahaman bahwa iman Kristen tidak hanya berorientasi pada keselamatan di masa depan, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong perubahan dan pembaruan kehidupan di dunia saat ini.¹⁴

Menurut Moltmann, pengharapan Kristen berakar pada kebangkitan Yesus Kristus yang menjadi jaminan bahwa Allah sedang bekerja untuk menghadirkan masa depan yang baru bagi manusia dan dunia. Oleh karena itu, orang percaya tidak dipanggil untuk pasif menunggu penggenapan janji Allah, melainkan terlibat secara aktif dalam mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah melalui tindakan nyata dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Pengharapan Kristen harus diwujudkan dalam perjuangan untuk menciptakan keadilan, perdamaian, dan pembebasan dari berbagai bentuk penindasan.¹⁵

Dalam perkembangan teologi politik Eropa, Moltmann bersama Johann Baptist Metz berupaya mengembalikan dimensi publik dari iman Kristen. Mereka mengkritik kecenderungan agama yang hanya ditempatkan dalam ranah privat dan tidak memberikan kontribusi

¹⁴ Argika Chandra Pasaribu, Arnon Romalis Sitepu, dan Vitasari Kesia Br. Sembiring, *Pendekatan Kontekstualisasi Eropa (Peranan Teologi Eropa, Teologi Pengharapan Jurgen Moltmann)*, hlm. 2–4.

¹⁵ Argika Chandra Pasaribu, Arnon Romalis Sitepu, dan Vitasari Kesia Br. Sembiring, *Pendekatan Kontekstualisasi Eropa (Peranan Teologi Eropa, Teologi Pengharapan Jurgen Moltmann)*, hlm. 3–5.

terhadap persoalan sosial masyarakat. Bagi Moltmann, gereja memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam kehidupan publik sebagai komunitas yang membawa harapan, mengkritik ketidakadilan, serta memperjuangkan martabat manusia. Dengan demikian, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembinaan spiritual, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, Jurgen Moltmann memandang bahwa harapan Kristen terhadap Kerajaan Allah harus diwujudkan dalam tindakan nyata di dunia saat ini. Gereja tidak hanya menantikan keselamatan di masa depan, tetapi juga bertanggung jawab memperjuangkan keadilan, perdamaian, kebebasan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Teologi Harapan dan Teologi Politik, Moltmann menegaskan bahwa gereja harus aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik sebagai wujud kesaksian iman yang menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia.

Pemikiran Moltmann relevan dengan penelitian ini karena menegaskan bahwa iman Kristen harus diwujudkan dalam keterlibatan aktif terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang sosial dan politik. Melalui teologi pengharapan, gereja dipandang memiliki peran

¹⁶ Naila Dwinanda Oktaviani, Deliana Fazra Oktafani, Leilani Azalia Putri, Ridha Ekayani, dan Dadan Firdaus, "Teologi Politik: Sejarah, Kontroversi, dan Relevansinya di Dunia Kontemporer," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 10, no. 3 (2025): 5.

untuk membangun kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi jemaat dalam kehidupan bersama demi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan umum.¹⁷

3. Stanley Hauerwas

Stanley Hauerwas merupakan seorang teolog dan etikus Kristen kontemporer yang dikenal melalui pemikirannya mengenai teologi publik, etika kebajikan, serta peran gereja dalam kehidupan sosial dan politik. Hauerwas berpendapat bahwa orang Kristen tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan masyarakat sehingga gereja perlu memiliki suatu teologi publik yang memungkinkan umat Kristen memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan bersama. Namun, keterlibatan tersebut tidak boleh menghilangkan identitas khas Kekristenan demi memperoleh penerimaan publik. Oleh karena itu, Hauerwas mengembangkan model teologi publik yang berpusat pada komunitas gereja dan narasi iman Kristen.¹⁸

Menurut Hauerwas, kehidupan moral seseorang tidak dapat dipisahkan dari komunitas tempat ia berada. Setiap komunitas memiliki narasi yang membentuk identitas, karakter, dan nilai-nilai yang dianut oleh anggotanya. Dalam konteks Kekristenan, narasi tersebut adalah kisah karya Allah dalam sejarah keselamatan, khususnya melalui

¹⁷ Naila Dwinanda Oktaviani dkk., “Teologi Politik: Sejarah, Kontroversi, dan Relevansinya di Dunia Kontemporer,” 5.

¹⁸ Calvin Bangun, “Teologi Publik Stanley Hauerwas dan Penerapannya dalam Konteks di Indonesia,” *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 2, no. 1 (2015): 153–154.

kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Narasi inilah yang membentuk gereja sebagai komunitas yang berbeda dari dunia dan menjadi dasar bagi tindakan moral orang percaya.¹⁹

Pemikiran Hauerwas menekankan bahwa gereja bukan sekadar lembaga keagamaan yang memiliki etika sosial, melainkan gereja itu sendiri adalah suatu etika sosial. Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah melalui kehidupan bersama yang mencerminkan kasih, keadilan, perdamaian, dan kebenaran. Dengan demikian, kontribusi gereja terhadap masyarakat tidak terutama dilakukan melalui penguasaan struktur politik atau kekuasaan negara, melainkan melalui kesaksian hidup yang nyata sebagai komunitas yang berbeda dan setia kepada Injil.²⁰

Dalam pandangan Hauerwas, tugas utama gereja bukanlah mentransformasi dunia melalui kekuasaan politik, melainkan menjadi gereja yang setia kepada panggilannya. Ia mengkritik kecenderungan gereja yang terlalu mengandalkan struktur politik untuk mewujudkan perubahan sosial karena hal tersebut berpotensi membuat gereja kehilangan identitasnya. Sebaliknya, gereja harus berfungsi sebagai *confessing church*, yaitu komunitas yang secara konsisten menyatakan

¹⁹ Calvin Bangun, "Teologi Publik Stanley Hauerwas dan Penerapannya dalam Konteks di Indonesia," 158–160.

²⁰ Stanley Hauerwas sebagaimana dikutip dalam Calvin Bangun, "Teologi Publik Stanley Hauerwas dan Penerapannya dalam Konteks di Indonesia," 158, 166–167.

dan menghidupi iman kepada Kristus dalam seluruh aspek kehidupan. Melalui kesaksian tersebut, gereja dapat memberikan pengaruh bagi masyarakat tanpa harus kehilangan karakter Kristiani yang menjadi ciri khasnya.²¹

Bagi Hauerwas, keterlibatan gereja dalam ruang publik tetap penting karena Injil memiliki dimensi sosial dan politis. Namun politik yang dimaksud bukanlah politik kekuasaan sebagaimana dipahami dunia pada umumnya, melainkan politik Kerajaan Allah yang diwujudkan melalui kehidupan gereja sebagai komunitas iman. Oleh sebab itu, gereja dipanggil untuk menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam masyarakat melalui teladan hidup, pembentukan karakter, serta pelayanan yang membawa damai dan keadilan bagi sesama.²²

Berdasarkan uraian di atas, Stanley Hauerwas menekankan bahwa kontribusi gereja dalam kehidupan sosial dan politik harus berangkat dari identitasnya sebagai komunitas iman yang setia kepada Injil. Gereja tidak dipanggil untuk mengejar kekuasaan politik, melainkan menjadi teladan moral yang membentuk karakter dan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan bersama yang mencerminkan kasih, keadilan, dan perdamaian, gereja

²¹ Calvin Bangun, "Teologi Publik Stanley Hauerwas dan Penerapannya dalam Konteks di Indonesia," 163–166.

²² Calvin Bangun, "Teologi Publik Stanley Hauerwas dan Penerapannya dalam Konteks di Indonesia," 165–167.

memberikan kesaksian publik yang mampu memengaruhi masyarakat tanpa kehilangan identitasnya sebagai tubuh Kristus.

Pemikiran Stanley Hauerwas relevan dengan penelitian ini karena menegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk hadir dalam kehidupan publik tanpa kehilangan identitasnya sebagai komunitas iman. Gereja dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran sosial dan politik jemaat melalui pembentukan karakter Kristiani yang berlandaskan nilai-nilai Injil, sehingga keterlibatan jemaat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tetap didasarkan pada iman dan tanggung jawab moral Kristen.²³

Berdasarkan tiga teori tokoh di atas, meskipun memiliki penekanan yang berbeda, ketiga tokoh tersebut memiliki kesamaan pandangan bahwa gereja tidak boleh terpisah dari kehidupan sosial dan politik masyarakat. Johann Baptist Metz menekankan solidaritas terhadap penderitaan dan perjuangan keadilan, Jurgen Moltmann menekankan peran gereja dalam menghadirkan harapan dan transformasi sosial, sedangkan Stanley Hauerwas menekankan pentingnya identitas gereja sebagai komunitas yang membentuk karakter dan kesaksian publik. Dengan demikian, teologi politik dapat dipahami sebagai upaya gereja untuk menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui keterlibatan yang kritis, bertanggung jawab, dan

²³ Calvin Bangun, "Teologi Publik Stanley Hauerwas dan Penerapannya dalam Konteks di Indonesia," 166–168.

berlandaskan iman Kristen. Berdasarkan hal ini, teologi politik dalam penelitian ini dipahami sebagai tanggung jawab gereja untuk hadir dalam kehidupan publik melalui pembinaan moral, pendidikan politik, penyuarakan keadilan, dan pembentukan karakter warga gereja. Gereja tidak dipanggil untuk menjadi alat kekuasaan politik, tetapi menjalankan fungsi profetik dan edukatif guna membangun kesadaran politik jemaat sesuai nilai-nilai Kristiani.

B. *CIVIL RELIGION*

Konsep *Civil religion* atau agama sipil menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami hubungan antara agama dan negara, terutama dalam konteks sosial-politik modern. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Amerika, Robert N. Bellah, dalam esainya yang berjudul *Civil religion in America*. Ia menyoroti bahwa meskipun konstitusi Amerika Serikat menjamin pemisahan antara gereja dan negara, nilai-nilai keagamaan tetap menjadi fondasi moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ini tidak hanya relevan di Amerika, tetapi juga memiliki aplikasi luas di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang memiliki sistem sosial-politik berbasis pluralisme agama dan ideologi Pancasila. Dalam pembahasan ini, konsep *Civil religion* akan diuraikan dalam tiga bagian utama: (a) Pengertian *Civil religion*, (b) *Civil religion* dalam Konteks Gereja, dan (c) *Civil religion* dalam Konteks Indonesia. Setiap bagian akan mengupas bagaimana agama dapat menjadi

kekuatan moral dalam kehidupan publik tanpa harus terikat langsung dengan institusi keagamaan tertentu.

Konsep *Civil religion* atau agama sipil pertama kali diperkenalkan oleh Robert N. Bellah untuk menggambarkan bagaimana agama berperan dalam kehidupan sosial dan politik suatu negara, tanpa terikat secara langsung dengan institusi keagamaan tertentu. Dalam pandangan Bellah, meskipun konstitusi di Amerika Serikat menegaskan pemisahan antara gereja dan negara, nilai-nilai keagamaan tetap memiliki pengaruh kuat dalam membentuk moralitas publik dan etika bernegara.²⁴

Bellah mengkritik cara pandang yang membedakan agama hanya sebagai urusan pribadi, sedangkan sektor publik dianggap sebagai ranah pemerintahan yang terpisah dari agama. Ia menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat Amerika, agama Biblikal telah lama menjadi bagian dari identitas nasional yang membentuk nilai-nilai moral kolektif.²⁵ Dengan kata lain, tidak ada aspek dalam kehidupan, baik pribadi maupun publik, yang benar-benar terpisah dari pengaruh agama. Dua alasan utama mendukung gagasan ini. Pertama, dalam tradisi agama Kristen dan Yahudi, Tuhan dipandang sebagai pencipta langit dan bumi serta berkuasa atas segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Oleh karena itu, tidak ada batasan yang jelas antara ranah privat dan publik dalam perspektif

²⁴ Robert N. Bellah, *Civil Religion in America*, Daedalus 96, No. 1 (1967): 1-21.

²⁵ Benyamin F. Intan, *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia* (New York: Peter Lang, 2006), 74.

keagamaan.²⁶ Kedua, dalam konteks demokrasi modern, istilah “publik” tidak hanya merujuk pada pemerintah, tetapi juga pada masyarakat secara luas. Dalam sejarah politik Amerika, agama sering menjadi bagian dari diskusi publik mengenai nilai-nilai kebangsaan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.²⁷

Para pendiri Amerika Serikat menyadari bahwa agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab. Bellah mengutip pernyataan John Adams, yang menegaskan bahwa konstitusi Amerika hanya dapat dipertahankan oleh masyarakat yang memiliki moralitas dan nilai-nilai keagamaan yang kuat.²⁸ Pandangan ini mencerminkan keyakinan bahwa kepercayaan agama dapat memberikan kontribusi penting bagi stabilitas politik dan pembangunan negara.

Berdasarkan hal di atas, konsep *Civil religion* yang diperkenalkan Robert N. Bellah menjelaskan bahwa agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik tanpa harus terikat langsung dengan institusi keagamaan tertentu.²⁹ Meski konstitusi Amerika Serikat memisahkan gereja dan negara, nilai-nilai keagamaan tetap membentuk moralitas publik dan etika bernegara. Bellah menolak pandangan yang menganggap agama hanya

²⁶ Yohanes T. Haryono, *Teologi Politik dan Etika Sosial dalam Gereja*, Jurnal Teologi Kontekstual 7, No. 1 (2022): 112.

²⁷ Denny J. Salong, *Gereja dan Negara dalam Perspektif Teologi Politik*, Jurnal Filsafat & Teologi 15, No. 2 (2021): 189.

²⁸ Robert N. Bellah, *The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial* (Chicago: University of Chicago Press, 1975), 23.

²⁹ Robert N. Bellah, *The Broken Covenant*, 23.

sebagai urusan pribadi, sebab dalam tradisi Kristen dan Yahudi, Tuhan dipandang berkuasa atas seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan bernegara. Dalam sistem demokrasi, masyarakat membawa nilai-nilai agama ke ruang publik, memengaruhi isu seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pandangan ini juga didukung oleh tokoh seperti John Adams yang menegaskan pentingnya moralitas agama dalam menjaga kestabilan negara.

Dalam kerangka *Civil religion*, gereja tidak semata-mata dilihat sebagai institusi keagamaan, melainkan sebagai penjaga moralitas publik. Konsep ini memungkinkan nilai-nilai keagamaan hadir dalam ruang publik tanpa mengaburkan batas antara gereja dan negara. Di Amerika Serikat, gereja berperan sebagai kekuatan sosial yang memengaruhi diskusi publik mengenai isu-isu moral seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebebasan beragama. Bellah menegaskan bahwa *Civil religion* bukanlah bentuk agama baru, melainkan nilai moral kolektif yang diakui bersama oleh warga negara.

Selain itu, dalam konteks politik Indonesia, peran gereja juga tidak dapat diabaikan. Singgih menyoroti bahwa belakangan ini semakin banyak pendapat yang mendorong orang-orang Kristen dan gereja untuk lebih aktif dalam dunia politik. Namun, keterlibatan yang dimaksud bukanlah dalam politik praktis, seperti menjadi anggota partai politik atau memperjuangkan kepentingan partai tertentu. Sebaliknya, mereka diharapkan untuk memperhatikan perkembangan politik di Indonesia, memberikan

pandangan kritis, serta mengambil sikap yang sesuai dengan nilai-nilai iman mereka.³⁰ Keterlibatan gereja dalam politik bukanlah fenomena baru. Dalam sejarah politik gereja di Indonesia, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa gereja memiliki hubungan yang erat dengan negara. Beberapa pejabat gereja bahkan diundang dalam acara kenegaraan dan dikenal sebagai "putra Gereja." Namun, ada pula pejabat yang kemudian berpindah agama atau meninggalkan gereja setelah menjabat di pemerintahan. Fenomena ini mencerminkan bahwa posisi gereja dalam politik tidak selalu stabil dan bergantung pada dinamika sosial serta politik yang berkembang.³¹

Perubahan besar dalam hubungan gereja dan politik mulai terjadi di era Reformasi. Pada masa ini, gereja dan persekutuan-persekutuan keagamaan mulai lebih aktif dalam membangun etika politik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah bagaimana doa-doa dan ibadah dalam gereja mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Sebelum Reformasi, doa-doa dalam gereja sering kali mendukung pemerintahan yang berkuasa tanpa kritik yang berarti. Namun, setelah Reformasi, mulai tumbuh kesadaran bahwa doa dan ibadah seharusnya juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan.³²

³⁰ Emmanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 26

³¹ Emmanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik*, 28.

³² Emmanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik*, 35.

Di Indonesia, konsep *Civil religion* tidak bisa dilepaskan dari ideologi Pancasila, yang berfungsi sebagai fondasi moral kolektif bangsa. John A. Titaley memaknai *Civil religion* dalam kerangka Pancasila sebagai agama sipil Indonesia. Ia menyoroti bahwa Pancasila bukan hanya ideologi politik, melainkan juga nilai moral bersama yang mampu menjembatani perbedaan antaragama dan membangun kerukunan sosial. Titaley mengkritik eksklusivisme agama yang cenderung memaksakan kebenaran mutlak dan mengabaikan nilai-nilai pluralisme yang menjadi ciri masyarakat Indonesia. Baginya, Pancasila harus dipahami sebagai fondasi moral kolektif yang memungkinkan semua agama hidup berdampingan secara damai dan setara.³³

Dengan demikian, konsep *Civil religion* dalam konteks Indonesia tercermin dalam peran gereja sebagai penjaga moral masyarakat yang berkontribusi dalam membentuk etika politik yang sehat, tanpa terlibat langsung dalam kekuasaan politik praktis. Gereja berfungsi sebagai kekuatan sosial yang mendorong terciptanya kehidupan berbangsa yang demokratis, adil, dan bermartabat.

Konsep *Civil religion* dalam konteks politik Indonesia juga diperkuat oleh pandangan Andreas A. Yewangoe yang menekankan pentingnya kebebasan beragama dan pluralisme. Yewangoe mengkritik kebijakan negara yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok

³³ John A. Titaley, *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme, dan Transformasi Agama-agama* (Salatiga: Satya Wacana University Press, 2013), hlm. 1-5.

minoritas agama dan menegaskan bahwa hukum agama seharusnya berlaku dalam lingkup komunitas pemeluknya tanpa dipaksakan di ruang publik yang heterogen. Ia menolak penerapan hukum syariah dalam peraturan daerah yang membatasi hak kelompok minoritas dan menegaskan bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama serta menjaga keadilan sosial tanpa memihak pada kelompok mayoritas semata.³⁴

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep *Civil religion* menggambarkan peran agama sebagai kekuatan moral dalam kehidupan sosial dan politik tanpa harus terikat langsung dengan institusi keagamaan tertentu. Konsep ini menegaskan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk moralitas publik dan etika bernegara, sebagaimana terlihat dalam konteks Amerika Serikat yang meskipun memisahkan gereja dan negara secara konstitusional, tetap menjadikan nilai Biblikal sebagai bagian dari identitas nasional. Dalam konteks Indonesia, konsep ini tercermin dalam peran gereja yang tidak terlibat dalam politik praktis, tetapi berfungsi sebagai kekuatan moral yang memberikan pandangan kritis terhadap dinamika politik dan mendorong nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan. Sejak era Reformasi, gereja mulai lebih aktif membangun etika politik dan menghadirkan nilai-nilai demokrasi dalam doa serta ibadah. Dengan demikian, baik di Amerika maupun Indonesia, *Civil religion* memperlihatkan

³⁴ Arthur Aritonang, *Tanggapan-Teologis Andreas A. Yewangoe Terhadap Otonomi Daerah di Indonesia Pada Era Reformasi*, Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama, Vol. 2, No. 2 (2020).

bahwa agama tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan membangun tatanan masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab.

C. PERAN GEREJA DALAM POLITIK

Gereja sebagai lembaga keagamaan tidak hanya memiliki fungsi spiritual, tetapi juga berperan dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Peran gereja meluas ke ranah sosial dan politik, tidak dalam bentuk politik praktis, tetapi lebih pada penguatan nilai moral dan etika dalam kehidupan publik. Gereja dipanggil untuk menjadi suara kenabian (*prophetic voice*) dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian.

1. Fungsi Gereja dalam Masyarakat

Fungsi utama gereja dalam masyarakat adalah sebagai penjaga nilai-nilai moral dan pembimbing spiritual yang berperan aktif dalam membangun harmoni sosial dan memperjuangkan keadilan. Gereja memiliki misi untuk menjadi agen perdamaian dan penegak keadilan sosial. Zakaria J. Ngelow dalam artikelnya menyebutkan bahwa misi gereja bukan sekadar untuk mengurus hal-hal rohani semata, melainkan juga menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia dalam bentuk keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi semua makhluk ciptaan.³⁵

Gereja juga berperan sebagai fasilitator dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Jefrie Walean menegaskan bahwa gereja harus menjadi kekuatan integratif dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia dengan mendorong terciptanya ruang dialog

³⁵ Zakaria J. Ngelow, *Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama – Peran Gereja dalam Politik di Indonesia*, Jurnal Jaffray, Vol. 12, No. 2 (Oktober 2014), hlm. 214-228.

antaragama untuk merawat harmoni sosial.³⁶ Dalam situasi konflik atau potensi perpecahan, gereja memiliki tanggung jawab untuk menjadi mediator dan penggerak rekonsiliasi.

Di Indonesia, nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan gereja memiliki tanggung jawab untuk mendukung implementasi nilai-nilai tersebut. I Made Priana memandang Pancasila sebagai bentuk *Civil religion* Indonesia yang memungkinkan agama-agama berkontribusi pada tujuan nasional, bukan hanya kepentingan internal masing-masing agama.³⁷

2. Peran Gereja dalam Politik

Gereja tidak berperan dalam politik praktis atau mendukung partai tertentu, melainkan berfungsi sebagai kekuatan moral yang memberikan kritik membangun serta memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas. Gereja bertindak sebagai *watchdog* dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Zakaria J. Ngelow, politik Kristen bukan berorientasi pada kekuasaan atau kepentingan pribadi, melainkan merupakan bentuk pelayanan yang berfokus pada memperjuangkan kepentingan bersama

³⁶ Jefrie Walean, *Gereja dalam Keragaman dan Keharmonisan: Studi Sosioteologis Merawat Kerukunan Hidup Beragama*, Magnum Opus, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 145-160.

³⁷ I Made Priana, *Pemahaman dan Pemaknaan Pancasila Sebagai Agama Sipil Indonesia dalam Pelaksanaan Misi Agama-Agama*, Jurnal Teologi dan Studi Agama, Vol. 8, No. 1 (2020), hlm. 73-88.

demi kesejahteraan semua.³⁸ Gereja memiliki tanggung jawab profetik untuk bersuara ketika ada ketidakadilan sosial, pelanggaran hak asasi manusia, atau kebijakan yang diskriminatif.

Dalam konteks Indonesia, Andreas A. Yewangoe menyoroti pentingnya gereja untuk menjaga pluralisme agama dan menentang penerapan hukum agama tertentu di ruang publik yang heterogen. Ia menegaskan bahwa kebebasan beragama harus dijaga sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Pancasila.³⁹ Yan Malino menambahkan bahwa gereja harus aktif dalam pendidikan politik jemaatnya melalui diskursus etika politik di ruang-ruang publik. Ini penting agar warga gereja memiliki kesadaran politik yang kritis dan mampu berpartisipasi dalam demokrasi secara sehat.⁴⁰

Contoh konkret peran gereja dalam dinamika politik dapat dilihat dalam studi kasus GKI Serpong. Gereja ini telah melakukan pendidikan politik bagi jemaatnya menjelang Pemilu 2024, meskipun tingkat partisipasi jemaat masih perlu ditingkatkan.⁴¹ Ini menegaskan bahwa gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai

³⁸ Zakaria J. Ngelow, *Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama – Peran Gereja dalam Politik di Indonesia*, Jurnal Jaffray, Vol. 12, No. 2 (Oktober 2014), hlm. 214-228.

³⁹ Arthur Aritonang, *Kebebasan Beragama dalam Pemikiran Andreas A. Yewangoe*, The New Perspective in Theology and Religious Studies, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 34-49.

⁴⁰ Arthur Aritonang, *Tanggapan Teologis Andreas A. Yewangoe Terhadap Otonomi Daerah di Indonesia pada Era Reformasi*, Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama, Vol. 2, No. 2 (2020), hlm. 45-

⁴¹ Yan Malino, *Agama dan Etika Politik: Peran Gereja dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi*, Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani, Vol. 9, No. 2 (2025), hlm. 201-215.

wadah pembelajaran politik yang berlandaskan nilai-nilai etika dan moral.

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami bahwa Gereja memiliki fungsi ganda dalam masyarakat: sebagai pelayan spiritual dan sebagai kekuatan moral yang berperan dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan demokratis. Dalam politik, gereja berfungsi sebagai suara kenabian yang memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian tanpa terjebak dalam politik praktis. Melalui pendidikan politik, dialog sosial, dan advokasi, gereja dapat berperan aktif dalam memperkuat demokrasi dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

3. Fungsi Profetik Gereja

a. Menegur Ketidakadilan

Metz menegaskan bahwa gereja tidak boleh berdiam diri terhadap penderitaan manusia dan berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Gereja dipanggil untuk hadir dalam realitas sosial sebagai bentuk solidaritas dengan mereka yang tertindas dan mengalami penderitaan. Oleh karena itu, salah satu fungsi profetik gereja adalah menegur berbagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat serta mengingatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan agar menjalankan tanggung jawabnya secara adil dan manusiawi.⁴²

⁴² Edwardus Renaldus Jawa, *Teologi Politik Menurut Pandangan Johann Baptist Metz*, hlm. 4–6.

b. Memperjuangkan Kebenaran

Menurut Jurgen Moltmann, gereja dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah di tengah dunia melalui perjuangan mewujudkan keadilan, kebebasan, dan perdamaian. Dalam menjalankan panggilannya, gereja tidak boleh bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang mengancam kehidupan manusia. Karena itu, fungsi profetik gereja juga diwujudkan melalui keberaniannya memperjuangkan kebenaran berdasarkan nilai-nilai Injil serta mendorong terwujudnya kehidupan yang lebih adil dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.⁴³

c. Menyuarakan Kepentingan Rakyat Kecil

Stanley Hauerwas memandang gereja sebagai komunitas yang menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah melalui kesaksian hidup di tengah masyarakat. Gereja dipanggil untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terutama mereka yang lemah dan terpinggirkan. Oleh sebab itu, fungsi profetik gereja juga diwujudkan melalui keberaniannya menyuarakan kepentingan rakyat kecil, kelompok rentan, dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekuasaan, sehingga kehadiran gereja dapat menjadi tanda kasih dan keadilan Allah dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴

⁴³ Argika Chandra Pasaribu, Arnon Romalis Sitepu, dan Vitasari Kesia Br. Sembiring, *Pendekatan Kontekstualisasi Eropa (Peranan Teologi Eropa, Teologi Pengharapan Jürgen Moltmann)*, hlm. 3–5.

⁴⁴ Calvin Bangun, “Teologi Publik Stanley Hauerwas dan Penerapannya dalam Konteks di Indonesia,” *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili* 2, no. 1 (2015): 166–168.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap berbagai penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta menunjukkan kebaruan penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, penelitian terdahulu juga menjadi landasan bagi peneliti dalam memahami perkembangan kajian mengenai hubungan gereja dan politik, peran gereja dalam kehidupan publik, serta keterlibatan jemaat dalam kehidupan politik.

Dalam penelitian ini, peneliti menelaah beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema peran gereja dalam politik dan pendidikan politik jemaat. Meskipun memiliki kesamaan dalam pembahasan mengenai gereja dan politik, masing-masing penelitian memiliki fokus, objek, dan konteks yang berbeda. Oleh karena itu, kajian terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memperjelas posisi penelitian mengenai Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Jemaat di Kota Palangka Raya: Tinjauan Teologi Politik. Adapun ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul/Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Zakaria J. Ngelow ⁴⁵	Peran gereja dalam politik di Indonesia	Gereja memiliki peran sebagai agen perubahan sosial yang membawa nilai-nilai etis dalam kehidupan politik serta menjaga netralitas dalam keterlibatan politik praktis.	Sama-sama membahas peran gereja dalam kehidupan politik dan pentingnya menjaga netralitas gereja.	Penelitian Ngelow membahas konteks nasional dan historis mengenai keterlibatan gereja dalam politik di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada GKE Betang Kahanjak Kota Palangka Raya serta meninjau peran gereja dalam membangun kesadaran politik jemaat melalui perspektif Teologi Politik.
Marfan Ferdinanda Tahamata &	Peran politik gereja dalam Pemilu 2024 (Studi Kasus GKI Serpong)	Gereja berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada	Sama-sama mengkaji peran gereja dalam politik,	Penelitian Tahamata dan Supratikno berfokus pada GKI

⁴⁵ Zakaria J. Ngelow, *Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama – Peran Gereja dalam Politik di Indonesia*, Jurnal Jaffray 12, No. 2 (2014): 214.

Peneliti	Judul/Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Agus Supratikno ⁴⁶		jemaat dengan tetap menjaga netralitas politik selama proses Pemilu.	khususnya dalam pendidikan politik dan pembinaan jemaat.	Serpong dalam konteks Pemilu 2024, sedangkan penelitian ini berfokus pada GKE Betang Kahanjak dan menelaah bagaimana gereja membangun kesadaran politik jemaat berdasarkan perspektif Teologi Politik.
Slamet Wiyono, M.Th. ⁴⁷	Peran gereja dalam perpolitikan di Indonesia	Gereja menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan politik, terutama dalam menjaga keseimbangan antara netralitas gereja dan	Sama-sama membahas tantangan gereja dalam kehidupan politik dan keterlibatan gereja dalam kehidupan publik.	Penelitian Wiyono bersifat umum dan tidak berfokus pada gereja tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji secara khusus

⁴⁶ Marfan Ferdinanda Tahamata & Agus Supratikno, *Peran Politik Gereja dalam Tahun Politik 2024: Studi Kasus GKI Serpong*, Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan 13, No. 2 (2024): 227.

⁴⁷ Slamet Wiyono, *Peran Gereja dalam Perpolitikan di Indonesia*, Jurnal Teologi 9, No. 1 (2023): 45.

Peneliti	Judul/Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.		GKE Betang Kahanjak melalui data empiris yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai peran gereja dalam kehidupan politik telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus mengkaji peran GKE Betang Kahanjak dalam membangun kesadaran politik jemaat di Kota Palangka Raya melalui perspektif Teologi Politik. Penelitian ini tidak hanya melihat keterlibatan gereja dalam kehidupan politik secara umum, tetapi juga menelaah bagaimana pemahaman politik gereja, peran gereja, pendidikan politik jemaat, serta partisipasi politik jemaat saling berkaitan dalam membentuk kesadaran politik warga gereja.

E. KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa gereja tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam bidang spiritual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif Teologi Politik, gereja dipanggil untuk hadir di tengah

kehidupan publik sebagai pembawa nilai-nilai Kerajaan Allah yang diwujudkan melalui keadilan, kebenaran, perdamaian, dan kepedulian terhadap sesama. Pemikiran Johann Baptist Metz, Jurgen Moltmann, dan Stanley Hauerwas menjadi landasan teologis dalam penelitian ini untuk memahami hubungan antara gereja dan kehidupan politik.

Berdasarkan perspektif Teologi Politik tersebut, gereja memiliki pemahaman bahwa politik bukan sekadar aktivitas perebutan kekuasaan, melainkan sarana untuk memperjuangkan kebaikan bersama, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman politik yang dimiliki gereja kemudian memengaruhi bagaimana gereja menjalankan perannya di tengah kehidupan jemaat dan masyarakat.

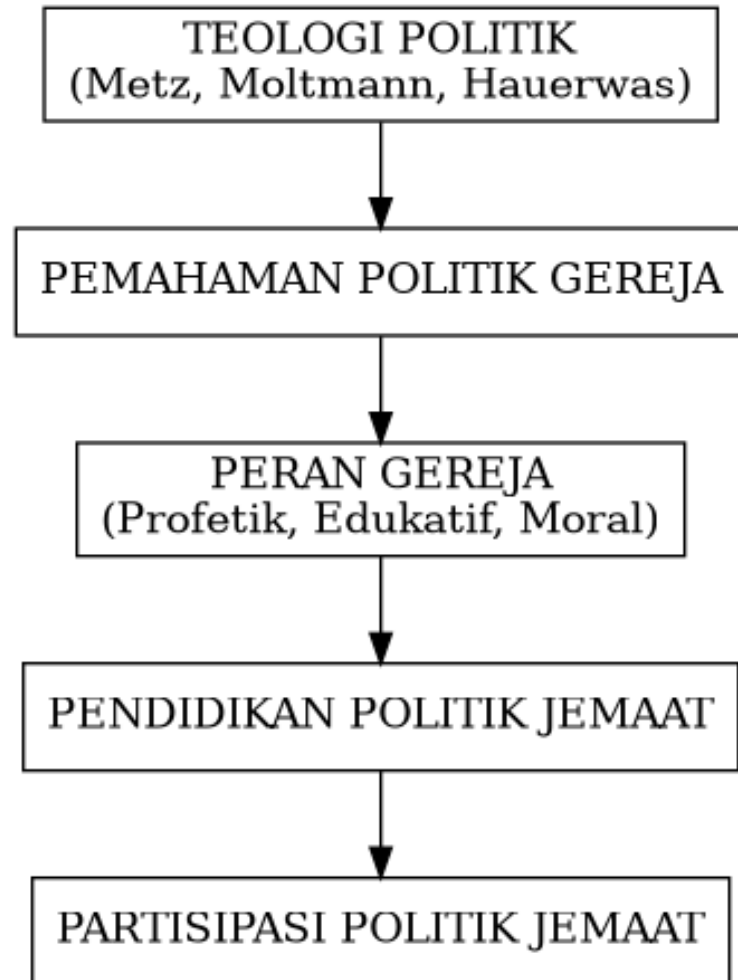
Peran gereja dalam penelitian ini dipahami melalui fungsi profetik, edukatif, dan moral. Fungsi profetik diwujudkan melalui keberanian gereja menegur ketidakadilan, memperjuangkan kebenaran, dan menyuarakan kepentingan rakyat kecil. Fungsi edukatif diwujudkan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pengajaran yang membantu jemaat memahami tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sementara itu, fungsi moral diwujudkan melalui pembentukan karakter dan nilai-nilai Kristiani yang menjadi dasar perilaku jemaat dalam kehidupan sosial dan politik.

Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pendidikan politik jemaat. Pendidikan politik yang diberikan gereja tidak bertujuan mengarahkan jemaat kepada pilihan politik tertentu, melainkan membangun pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab politik

yang sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Melalui pendidikan politik tersebut, jemaat diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memiliki sikap kritis terhadap berbagai persoalan sosial-politik, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Pada akhirnya, pendidikan politik yang dilakukan gereja diharapkan menghasilkan partisipasi politik jemaat yang sehat dan bertanggung jawab. Partisipasi tersebut tercermin dalam keterlibatan jemaat dalam kehidupan demokrasi, penggunaan hak politik secara bijaksana, serta komitmen untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kasih dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berdasarkan alur pemikiran tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana Teologi Politik memengaruhi pemahaman politik gereja, bagaimana pemahaman tersebut diwujudkan melalui peran gereja, serta bagaimana peran tersebut berkontribusi dalam membangun pendidikan dan partisipasi politik jemaat di GKE Betang Kahanjak Kota Palangka Raya.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam peran GKE Betang Kahanjak dalam membangun kesadaran politik jemaat di Kota Palangka Raya.

B. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai fenomena yang diteliti tanpa menguji hipotesis atau menganalisis hubungan sebab-akibat secara mendalam. Penelitian ini berusaha untuk memahami dan mendeskripsikan peran serta fungsi GKE Betang Kahanjak dalam konteks politik di Kota Palangka Raya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial secara alami dengan mendasarkan analisis pada data empiris yang diperoleh dari informan terkait. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, peneliti tidak hanya menguraikan fakta tetapi juga menganalisis pola dan hubungan yang muncul dari data yang dikumpulkan. Teknik analisis data dalam

penelitian ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peran GKE Betang Kahanjak dalam politik lokal, serta bagaimana gereja ini berkontribusi dalam dinamika sosial dan politik di Palangka Raya.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di GKE Betang Kahanjak, yang berlokasi di Jln. Yogyakarta, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874. Pemilihan GKE Betang Kahanjak sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis, yaitu:

1. Statusnya sebagai jemaat yang relatif baru (diresmikan tahun 2023), sehingga menarik untuk melihat bagaimana fondasi kesadaran politik diletakkan sejak dini.
2. Lokasinya yang strategis di Kota Palangka Raya, yang menjadikannya titik temu bagi jemaat dengan latar belakang sosial-politik yang heterogen.
3. Keterbukaan pimpinan jemaat terhadap diskusi mengenai isu-isu publik, yang mempermudah proses penggalan data secara mendalam."

D. WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan sejak Februari 2025 – Juni 2026 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2. Waktu Penelitian

Tahapan Penelitian	Feb 2025				Mar 2025				April 2025				Mei 2026				Juni 2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan dan pengajuan judul	✓	✓	✓	✓																
Pengajuan penelitian	✓	✓	✓	✓																
Seminar	✓	✓	✓	✓																
Pengumpulan data					✓	✓	✓	✓												
Analisis Data									✓	✓	✓	✓								
Penyusunan Laporan Penelitian													✓	✓	✓	✓				
Ujian Skripsi																	✓	✓	✓	✓

E. SUMBER DATA PENELITIAN

Menurut Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif berasal dari ucapan atau tindakan subjek penelitian atau informan. Data ini diperkuat dengan dokumentasi, seperti foto dan catatan tertulis, yang berfungsi sebagai data tambahan.⁴⁸

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan penelitian tanpa perantara. Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti melalui interaksi langsung dengan responden.⁴⁹ Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Teknik pengumpulan data ini

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 49.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 308.

dilakukan secara langsung dan tatap muka untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam aktivitas gereja serta memiliki pemahaman mengenai peran GKE Betang Kahanjak dalam kehidupan politik jemaat.

Penelitian ini menerapkan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan secara fleksibel berdasarkan respons informan guna menggali data yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk mengeksplorasi peran jemaat GKE Betang Kahanjak dalam berpolitik di Kota Palangka Raya. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, tetapi tetap terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut sesuai dengan tanggapan informan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai dokumen dan arsip yang dimiliki oleh Majelis Jemaat GKE Betang Kahanjak, seperti profil gereja, data keanggotaan jemaat, program pelayanan, laporan kegiatan, tata tertib, dokumentasi kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut digunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang digunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati peran GKE Betang Kahanjak. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi pengamat sebagai partisipan, di mana peneliti tetap menjaga peran sebagai pengamat namun ikut serta dalam situasi yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara pewawancara dan narasumber. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, wawancara adalah teknik pengumpulan data penelitian tatap muka yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber data secara langsung. Teknik ini sering diterapkan dalam penelitian deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam.⁵⁰ Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah memperoleh informasi dari narasumber guna mengevaluasi suatu masalah atau kebijakan. Data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, dengan informan

⁵⁰ Sukmadinat, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

utama terdiri dari pendeta, penatua/diakon, dan jemaat GKE Betang Kahanjak.

Tabel 3. Jumlah Informan

No.	Informan	Kriteria	Jumlah
1	Pendeta		1
2	Penatua/Diakon	a) Sedang menjabat aktif minimal satu periode kepengurusan, b) Terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan atau penyusunan program jemaat.	2
3	Jemaat	a) Merupakan anggota jemaat aktif GKE Betang Kahanjak minimal selama 2 tahun terakhir, b) Pernah mengikuti kegiatan sosial atau pembinaan yang diselenggarakan gereja, c) Bersedia memberikan informasi secara terbuka terkait persepsi politiknya.	4
	Total		7

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengamati atau menganalisis dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian maupun pihak lain yang berhubungan dengan subjek tersebut. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan meneliti arsip-arsip GKE Betang Kahanjak.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran GKE Betang Kahanjak dalam membangun kesadaran politik jemaat di Kota Palangka Raya. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵¹

1. Reduksi

Reduksi data merupakan proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang kurang relevan disingkirkan, sementara informasi yang signifikan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian. Tujuan utama dari reduksi data adalah menyaring informasi yang paling penting agar analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan terarah.⁵² Adapun data yang direduksi dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai: 1) Pemahaman politik gereja; 2) Peran gereja dalam kehidupan politik; 3) Pendidikan politik jemaat; 4) Partisipasi politik

⁵¹ Miles, M.B., & Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1994), 10-12.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 105.

jemaat. Data-data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan fokus penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lebih lanjut.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi, data disajikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat berbentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram, yang membantu mengidentifikasi pola serta hubungan antarvariabel dalam penelitian. Penyajian yang terstruktur dengan baik mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan yang valid dan akurat.⁵³

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam beberapa kategori sesuai fokus penelitian. Melalui penyajian data tersebut, peneliti dapat melihat pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data lapangan sehingga memudahkan proses interpretasi.

3. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menghubungkannya dengan fokus penelitian dan perspektif Teologi Politik. Tema-tema yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi pemahaman

⁵³ Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 159.

politik gereja, peran gereja dalam kehidupan politik, pendidikan politik jemaat, serta partisipasi politik jemaat. Selanjutnya, tema-tema tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana GKE Betang Kahanjak membangun kesadaran politik jemaat di Kota Palangka Raya. Untuk memastikan keabsahan hasil penelitian, peneliti melakukan verifikasi secara terus-menerus melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check terhadap data yang diperoleh.⁵⁴

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari pendeta, majelis gereja, dan jemaat GKE Betang Kahanjak. Informasi yang diberikan oleh masing-masing informan dibandingkan untuk melihat kesesuaian maupun perbedaan data yang berkaitan dengan pemahaman politik gereja, peran gereja dalam kehidupan politik, pendidikan politik jemaat, dan partisipasi politik jemaat. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan terpercaya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil wawancara dengan informan

⁵⁴ Creswell, J.W., *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Los Angeles: SAGE Publications, 2013), 178.

dibandingkan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lingkungan GKE Betang Kahanjak serta didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi dan kebenaran informasi yang diperoleh selama penelitian.

c. Member Check

Member check dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi data kepada informan yang bersangkutan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dicatat dan ditafsirkan oleh peneliti telah sesuai dengan maksud dan pengalaman yang disampaikan oleh informan. Melalui member check, informan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi apabila terdapat informasi yang kurang tepat sehingga hasil penelitian memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi.

Dengan menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check, peneliti berupaya memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang memadai serta dapat digunakan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. PROFIL GKE BETANG KAHANJAK

Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Betang Kahanjak terletak di Jalan Yogyakarta Blok A2, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Gereja ini merupakan pemekaran dari GKE Agape Palangka Raya pada tahun 2022, setelah sebelumnya berstatus sebagai lingkungan selama satu tahun. Pada tahun 2023, GKE Betang Kahanjak resmi menjadi calon jemaat dengan masa kepengurusan 2023-2028. Saat ini, GKE Betang Kahanjak memiliki sekitar 128 Kepala Keluarga (KK) dan lebih dari 400 jemaat. Meskipun demikian, banyak jemaat yang bekerja di luar kota, sehingga hanya hadir secara penuh pada hari-hari besar gerejawi. Gereja ini aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan ibadah, termasuk ibadah umum, Seksi Pelayanan Anak (SPA), Seksi Pelayanan Perempuan (SPPer), Seksi Pelayanan Bapak (SPB), Seksi Pelayanan Remaja dan Pemuda (SPRP), serta kelompok lansia Kasanang. Ibadah umum dilaksanakan setiap Minggu pukul 08.00 WIB, dengan Minggu keempat menggunakan Bahasa Dayak Ngaju.

GKE Betang Kahanjak juga aktif dalam kegiatan sosial dan pembangunan. Pada tahun 2023, PT Citra Agro Abadi (CAA) memberikan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung pembangunan gereja ini. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh *Senior*

Manager Corporate Affairs and Legal Region Kalimantan PT CAA, Raden Agus Hiramawan, kepada Ketua Jemaat GKE Betang Kahanjak, Turina Baboe. Bantuan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan gereja dan memperkuat peran gereja dalam masyarakat. Sebagai bagian dari GKE, yang memiliki sejarah panjang dalam pelayanan di Kalimantan, GKE Betang Kahanjak berkomitmen untuk terus berkembang dan melayani jemaat serta masyarakat sekitar. Dengan semangat Huma Betang falsafah hidup masyarakat Dayak yang menekankan nilai-nilai kebersamaan dan toleransi gereja ini berupaya menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah keberagaman.

GKE Betang Kahanjak juga aktif dalam merayakan hari-hari besar gerejawi. Sebagai contoh, pada Januari 2025, gereja ini menyelenggarakan perayaan Natal bersama alumni SMAN 1 Palangka Raya angkatan 1981–1982 dan kelompok lansia Kasanang. Kegiatan ini menunjukkan komitmen gereja dalam membangun komunitas yang inklusif dan peduli terhadap semua anggotanya. Dengan segala aktivitas dan komitmennya, GKE Betang Kahanjak menjadi pusat rohani yang tidak hanya melayani jemaat, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan sosial dan budaya di Kota Palangka Raya.

B. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan para informan serta observasi lapangan yang dilakukan peneliti di GKE Betang Kahanjak Kota Palangka Raya akan disajikan berdasarkan fokus penelitian yang meliputi pemahaman politik gereja, peran gereja dalam membangun kesadaran politik jemaat, pendidikan politik jemaat, dan partisipasi politik

jemaat. Sebagai langkah awal, profil informan yang terlibat disajikan menggunakan kode sebagai berikut: P.01 untuk Pendeta, PT.01 untuk Penatua, DK.01 untuk Diaken, JM.01, JM.02, dan JM.03 untuk Jemaat, PJ.01.

1. Politik Menurut GKE Betang Kahanjak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendeta, penatua, diaken, dan warga jemaat, diketahui bahwa GKE Betang Kahanjak memahami politik sebagai bagian dari kehidupan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab orang percaya sebagai warga negara. Politik dipandang bukan hanya sebagai aktivitas untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai iman Kristen.

Pendeta GKE Betang Kahanjak menjelaskan bahwa gereja tidak memandang politik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen. Menurutnya, politik merupakan bagian dari tanggung jawab orang percaya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga harus dijalankan berdasarkan nilai kejujuran, keadilan, dan kasih. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut.

“Menurut saya politik merupakan bagian dari kehidupan manusia sebagai warga negara. Politik tidak selalu identik dengan perebutan kekuasaan. Dalam pandangan gereja, politik juga berbicara tentang bagaimana mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu orang Kristen tidak boleh anti

terhadap politik, tetapi harus memahami politik secara benar.”
(P.01)

Lebih lanjut, P.01 menegaskan bahwa gereja tidak menganggap politik bertentangan dengan iman Kristen, tetapi menolak praktik politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Injil.

“Tidak. Justru iman Kristen mengajarkan tanggung jawab kepada sesama. Politik menjadi salah satu ruang untuk mewujudkan kasih, kejujuran, dan keadilan. Yang kami hindari adalah politik praktis yang dapat memecah persatuan jemaat.” (P.01)

Pandangan tersebut diperkuat oleh Penatua (PT.01) yang memandang bahwa politik merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi secara bertanggung jawab.

“Politik menurut saya adalah bagian dari kehidupan bermasyarakat. Semua orang mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik selama dilakukan dengan cara yang benar.” (PT.01)

Hal senada juga disampaikan oleh Diaken (DK.01) yang menjelaskan bahwa peran gereja bukan terlibat dalam kampanye politik, melainkan membimbing jemaat agar memahami politik berdasarkan Firman Tuhan.

“Peran gereja bukan ikut berkampanye, tetapi membimbing jemaat supaya memiliki pemahaman politik yang benar berdasarkan Firman Tuhan.” (DK.01)

Pemahaman tersebut juga dimiliki oleh warga jemaat. Salah seorang jemaat (JM.01) menyampaikan bahwa politik dipahami sebagai proses memilih pemimpin dan mengatur kehidupan bersama.

“Menurut saya politik adalah cara masyarakat memilih pemimpin dan mengatur kehidupan bersama.” (JM.01)

Sementara itu, JM.03 memandang bahwa politik memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat, namun harus dijalankan secara jujur dan adil.

“Politik penting karena menentukan arah pembangunan masyarakat. Tetapi harus dijalankan secara jujur dan adil.” (JM.03)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa GKE Betang Kahanjak memandang politik sebagai bagian dari tanggung jawab orang percaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politik dipahami sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai Kristiani, sedangkan politik praktis yang berpotensi memecah persatuan gereja tidak menjadi bagian dari pelayanan gereja.

2. Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Warga Jemaat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa GKE Betang Kahanjak membangun kesadaran politik warga jemaat melalui pembinaan iman, khotbah, pelayanan pastoral, pendidikan etika Kristen, serta menjaga netralitas gereja sebagai lembaga keagamaan.

Pendeta menjelaskan bahwa gereja membangun kesadaran politik melalui berbagai bentuk pelayanan, terutama khotbah dan pembinaan jemaat.

“Melalui khotbah, pembinaan, pendalaman Alkitab, dan percakapan pastoral. Kami selalu mengingatkan agar jemaat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, memilih pemimpin yang berintegritas, dan menghindari politik uang maupun berita bohong.” (P.01)

Selain itu, gereja juga menjaga netralitas dengan tidak memberikan dukungan kepada calon ataupun partai politik tertentu.

“Kami tetap menjaga netralitas. Gereja tidak pernah mengarahkan jemaat untuk memilih calon tertentu. Jemaat bebas menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing.” (P.01)

Penatua (PT.01) juga menjelaskan bahwa pendidikan politik yang diberikan gereja lebih menekankan pada pembentukan tanggung jawab moral daripada mengarahkan pilihan politik jemaat.

“Biasanya melalui khotbah, pembinaan, dan diskusi ketika ada isu yang berkembang. Yang ditekankan bukan memilih siapa, tetapi bagaimana menjadi warga negara yang bertanggung jawab.” (PT.01)

Menurut PT.01, netralitas gereja menjadi prinsip penting agar kehidupan bergereja tetap harmonis.

“Karena jemaat memiliki pilihan politik yang berbeda-beda. Kalau gereja memihak salah satu calon, bisa menimbulkan perpecahan. Gereja harus menjadi rumah bagi semua jemaat.” (PT.01)

Diaken (DK.01) juga menyampaikan bahwa gereja secara konsisten mendorong jemaat untuk menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

“Kami selalu mengingatkan agar jemaat tidak golput, tetapi menggunakan hak pilih dengan bijaksana dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu.” (DK.01)

Selain itu, gereja terus mengingatkan pentingnya menjaga persatuan meskipun terdapat perbedaan pilihan politik.

“Kami mengingatkan bahwa perbedaan pilihan tidak boleh merusak persaudaraan. Semua tetap saudara seiman.” (DK.01)

Hal tersebut dirasakan oleh warga jemaat. JM.01 menyatakan bahwa gereja tidak pernah mengarahkan pilihan politik jemaat.

“Pendeta sering mengingatkan supaya kami menggunakan hak pilih dengan baik dan jangan mudah percaya berita yang belum jelas.” (JM.01)

“Tidak pernah. Kami diberi kebebasan memilih sendiri.” (JM.01)

JM.02 juga mengungkapkan bahwa pembinaan gereja membantu jemaat memilih pemimpin berdasarkan integritas.

“Kami menjadi lebih mengerti bahwa memilih pemimpin harus melihat integritasnya, bukan karena uang atau hubungan keluarga.” (JM.02)

Sementara itu, PJ.01 menjelaskan bahwa pembinaan kepada pemuda dilakukan agar generasi muda memiliki sikap kritis namun tetap berlandaskan nilai-nilai Kekristenan.

“Melalui ibadah pemuda, pembinaan, dan nasihat dari pendeta. Kami diajak berpikir kritis tetapi tetap berdasarkan nilai-nilai Kristen.” (PJ.01)

Ia juga menambahkan bahwa gereja mengajarkan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik.

“Saya belajar bahwa sebagai orang Kristen kami harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menjaga persatuan, dan tidak menyebarkan kebencian meskipun berbeda pilihan politik.” (PJ.01)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa GKE Betang Kahanjak membangun kesadaran politik warga jemaat melalui

pembinaan iman, pendidikan etika Kristen, pelayanan pastoral, dan penyampaian khotbah, dengan tetap menjaga netralitas terhadap politik praktis. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk membentuk warga jemaat yang memiliki tanggung jawab moral, mampu menggunakan hak politik secara bijaksana, serta menjaga persatuan dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Pemahaman GKE Betang Kahanjak tentang Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GKE Betang Kahanjak memahami politik sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab orang percaya sebagai warga negara. Politik tidak dipandang semata-mata sebagai perebutan kekuasaan ataupun aktivitas partai politik, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai iman Kristen. Oleh karena itu, gereja tidak mengajarkan jemaat untuk menjauhi politik, tetapi membangun pemahaman bahwa keterlibatan dalam kehidupan politik harus dilaksanakan secara etis, bertanggung jawab, dan tetap berlandaskan pada ajaran Kristus.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa GKE Betang Kahanjak tidak menempatkan politik sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan iman. Sebaliknya, politik dipandang sebagai salah satu ruang pengabdian bagi orang percaya untuk mewujudkan kasih, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam perspektif ini, politik tidak lagi

dipahami sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk melayani masyarakat melalui tanggung jawab sebagai warga negara.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pemikiran Johann Baptist Metz yang menegaskan bahwa iman Kristen tidak boleh diprivatisasi sehingga hanya berkaitan dengan urusan spiritual semata. Menurut Metz, gereja memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir dalam kehidupan masyarakat serta memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan publik, termasuk kehidupan politik. Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang menghadirkan keadilan dan solidaritas kepada masyarakat melalui keterlibatan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman politik yang dimiliki GKE Betang Kahanjak mencerminkan pandangan bahwa kehidupan politik merupakan bagian dari tanggung jawab iman, bukan sesuatu yang harus dihindari.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa gereja tetap menjaga jarak terhadap politik praktis. Gereja tidak memberikan dukungan kepada partai politik ataupun calon tertentu, tetapi tetap memberikan pembinaan agar jemaat mampu menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab. Sikap tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara keterlibatan dalam kehidupan sosial dengan komitmen menjaga independensi gereja sebagai lembaga keagamaan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Jürgen Moltmann mengenai Teologi Harapan. Moltmann menegaskan bahwa gereja dipanggil

untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. Keterlibatan tersebut bukan diwujudkan melalui perebutan kekuasaan politik, melainkan melalui upaya menghadirkan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, gereja tetap memiliki tanggung jawab untuk membangun kesadaran sosial dan politik jemaat meskipun tidak terlibat dalam politik praktis.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa GKE Betang Kahanjak menempatkan pembentukan karakter Kristen sebagai dasar utama sebelum seseorang terlibat dalam kehidupan politik. Gereja lebih menekankan pembinaan iman, kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan kasih dibandingkan mengajarkan strategi politik ataupun kepentingan praktis. Dengan demikian, gereja memandang bahwa kualitas moral seseorang akan menentukan kualitas partisipasinya dalam kehidupan politik.

Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan pemikiran Stanley Hauerwas yang menekankan bahwa gereja merupakan komunitas yang membentuk karakter moral warga jemaat. Menurut Hauerwas, kontribusi utama gereja terhadap kehidupan publik bukan diperoleh melalui penguasaan kekuasaan politik, melainkan melalui pembentukan pribadi-pribadi yang hidup berdasarkan nilai-nilai Injil. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang menghasilkan warga negara yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Perspektif ini tampak

dalam pelayanan GKE Betang Kahanjak yang lebih mengutamakan pembinaan karakter daripada keterlibatan dalam politik praktis.

Selain itu, pemahaman politik yang berkembang di GKE Betang Kahanjak juga dapat dipahami melalui konsep Civil Religion. Konsep ini menjelaskan bahwa agama memiliki kontribusi penting dalam membangun moralitas publik tanpa harus menjadi bagian dari struktur kekuasaan negara. Gereja berfungsi sebagai kekuatan moral yang memberikan nilai-nilai etika kepada masyarakat sehingga kehidupan politik tetap diarahkan pada kepentingan bersama. Dalam konteks penelitian ini, GKE Betang Kahanjak menjalankan fungsi tersebut dengan memberikan pembinaan moral kepada jemaat tanpa mengarahkan pilihan politik mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa gereja berusaha menjaga keseimbangan antara kebebasan politik warga jemaat dengan tanggung jawab moral sebagai komunitas iman.

Apabila dianalisis secara keseluruhan, pemahaman politik di GKE Betang Kahanjak memperlihatkan bahwa gereja tidak memisahkan kehidupan iman dari kehidupan sosial. Politik dipahami sebagai salah satu bentuk tanggung jawab orang percaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, keterlibatan tersebut harus tetap dilandasi nilai-nilai Kristen sehingga tidak berubah menjadi kepentingan kekuasaan ataupun politik praktis yang dapat merusak kesatuan gereja.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif Teologi Politik, pemahaman GKE Betang Kahanjak tentang politik menunjukkan bahwa gereja memandang politik sebagai ruang pelayanan yang harus dijalankan

berdasarkan nilai keadilan, kasih, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Gereja tidak dipanggil menjadi pelaku politik praktis, tetapi menjadi komunitas iman yang membentuk warga jemaat agar mampu menjalankan tanggung jawab politik secara etis dan sesuai dengan ajaran Kristus.

2. Implementasi Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Warga Jemaat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peran GKE Betang Kahanjak dalam membangun kesadaran politik warga jemaat dilakukan melalui pembinaan iman, pendidikan moral, penyampaian khotbah, pendampingan pastoral, serta penguatan nilai-nilai etika Kristen dalam setiap kegiatan pelayanan gereja. Peran tersebut tidak diwujudkan melalui keterlibatan langsung dalam politik praktis, melainkan melalui proses pembentukan karakter dan kesadaran warga jemaat agar mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara secara bertanggung jawab.

Temuan ini memperlihatkan bahwa gereja memahami pembangunan kesadaran politik sebagai bagian dari proses pembinaan iman. Kesadaran politik tidak dipandang sebagai kemampuan memahami dinamika politik semata, tetapi juga sebagai kemampuan mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Oleh sebab itu, gereja lebih menekankan pembentukan karakter daripada memberikan pendidikan politik yang bersifat teknis maupun praktis.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa gereja memandang kehidupan politik sebagai bagian dari panggilan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pembinaan iman, gereja membentuk jemaat agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa secara jujur, adil, bertanggung jawab, serta menghargai martabat setiap manusia. Dengan demikian, pendidikan politik yang diberikan gereja tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan politik, tetapi juga membentuk kualitas moral warga jemaat.

Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran Johann Baptist Metz yang menegaskan bahwa gereja memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solidaritas dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Metz, gereja tidak dapat membatasi pelayanannya hanya pada aspek spiritual, tetapi juga harus membangun kesadaran sosial melalui tindakan nyata yang berpihak kepada kepentingan bersama. Dalam penelitian ini, peran GKE Betang Kahanjak tercermin melalui upaya membimbing jemaat agar memiliki kepedulian terhadap kehidupan masyarakat sekaligus mampu menjalankan hak politik secara bertanggung jawab. Dengan demikian, gereja menjalankan fungsi sosialnya tanpa harus menjadi bagian dari kepentingan politik praktis.

Implementasi peran gereja juga terlihat melalui penyampaian khotbah dan pembinaan yang secara konsisten mengingatkan jemaat mengenai pentingnya kejujuran, tanggung jawab, kasih, serta kepedulian

terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi warga jemaat dalam menentukan sikap terhadap berbagai persoalan sosial maupun politik. Melalui proses tersebut, gereja berupaya membangun kesadaran bahwa setiap keputusan politik harus mempertimbangkan kepentingan bersama, bukan semata-mata kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Temuan tersebut sejalan dengan pemikiran Jürgen Moltmann mengenai Teologi Harapan. Moltmann memandang bahwa gereja dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda Kerajaan Allah melalui upaya menciptakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Pengharapan Kristen tidak hanya diarahkan kepada kehidupan yang akan datang, tetapi juga diwujudkan dalam tanggung jawab terhadap kehidupan dunia saat ini. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan GKE Betang Kahanjak dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari tanggung jawab gereja dalam menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah melalui pendidikan moral dan pembentukan kesadaran politik warga jemaat.

Selain melalui pembinaan, penelitian ini juga menemukan bahwa GKE Betang Kahanjak menjaga netralitas sebagai lembaga gereja. Sikap tersebut diwujudkan dengan tidak memberikan dukungan kepada calon ataupun partai politik tertentu. Gereja memberikan kebebasan kepada setiap warga jemaat untuk menentukan pilihan politik sesuai hati nurani masing-masing, namun tetap mengingatkan agar pilihan tersebut didasarkan pada pertimbangan moral, integritas, serta kepentingan masyarakat luas.

Netralitas tersebut bukan menunjukkan sikap apatis terhadap kehidupan politik, melainkan bentuk tanggung jawab gereja dalam menjaga persatuan jemaat. Gereja menyadari bahwa warga jemaat berasal dari latar belakang sosial dan pilihan politik yang berbeda. Oleh sebab itu, menjaga netralitas menjadi salah satu cara agar kehidupan persekutuan tetap terpelihara serta terhindar dari konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan politik.

Pandangan tersebut memiliki kesesuaian dengan pemikiran Stanley Hauerwas yang menegaskan bahwa gereja merupakan komunitas yang membentuk karakter moral masyarakat. Menurut Hauerwas, gereja tidak dipanggil untuk mengejar kekuasaan politik, melainkan menghadirkan kesaksian melalui kehidupan bersama yang mencerminkan kasih, keadilan, dan perdamaian. Kontribusi gereja terhadap kehidupan publik diwujudkan melalui pembentukan karakter warga jemaat sehingga mereka mampu memberikan pengaruh positif dalam masyarakat. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa GKE Betang Kahanjak menjalankan peran tersebut dengan mempersiapkan warga jemaat menjadi pribadi yang memiliki integritas dalam kehidupan sosial maupun politik.

Implementasi peran gereja dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi profetik gereja. Fungsi profetik tidak diwujudkan melalui dukungan politik ataupun keterlibatan dalam perebutan kekuasaan, melainkan melalui penyampaian nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab berdasarkan Firman Tuhan. Gereja secara konsisten

mengingatkan jemaat agar menghindari praktik politik uang, penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ajaran Kristen.

Selain fungsi profetik, gereja juga menjalankan fungsi edukatif. Melalui khotbah, persekutuan, pembinaan jemaat, serta pelayanan pastoral, gereja memberikan pendidikan politik yang berorientasi pada pembentukan karakter. Pendidikan tersebut tidak diarahkan untuk memengaruhi pilihan politik jemaat, tetapi membantu mereka memahami tanggung jawab sebagai warga negara yang hidup berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dengan demikian, gereja menjalankan pendidikan politik yang bersifat etis dan transformatif.

Apabila dianalisis menggunakan konsep Civil Religion, implementasi peran GKE Betang Kahanjak menunjukkan bahwa gereja berfungsi sebagai kekuatan moral dalam kehidupan masyarakat. Gereja tidak menjadi bagian dari struktur kekuasaan politik, tetapi memberikan kontribusi melalui pembentukan etika publik yang didasarkan pada nilai kejujuran, keadilan, kasih, dan tanggung jawab. Peran tersebut memungkinkan gereja berkontribusi terhadap pembangunan kehidupan demokrasi tanpa kehilangan identitasnya sebagai komunitas iman.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pembangunan kesadaran politik di GKE Betang Kahanjak dilakukan secara berkesinambungan melalui seluruh aktivitas pelayanan gereja. Kesadaran

politik tidak dibentuk hanya menjelang pemilihan umum, tetapi menjadi bagian dari proses pembinaan jemaat yang berlangsung terus-menerus. Hal tersebut menunjukkan bahwa gereja memandang pembentukan kesadaran politik sebagai bagian integral dari pembentukan kehidupan iman warga jemaat.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat dipahami bahwa implementasi peran GKE Betang Kahanjak dalam membangun kesadaran politik warga jemaat tidak dilakukan melalui pendekatan politik praktis, tetapi melalui pelayanan pastoral, pembinaan karakter, pendidikan etika Kristen, serta penguatan fungsi profetik gereja. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa gereja berupaya membentuk warga jemaat yang tidak hanya dewasa secara spiritual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan politik sebagai bagian dari panggilannya sebagai orang percaya.

Dengan demikian, implementasi peran GKE Betang Kahanjak memperlihatkan bahwa gereja mampu menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan publik tanpa kehilangan identitas sebagai komunitas iman. Gereja tetap menjaga netralitas sebagai lembaga keagamaan, namun secara aktif membentuk warga jemaat agar memiliki kesadaran politik yang etis, kritis, bertanggung jawab, serta berlandaskan pada nilai-nilai Injil. Temuan ini menegaskan bahwa peran gereja dalam kehidupan politik tidak diukur dari keterlibatannya dalam politik praktis, melainkan dari kemampuannya membentuk warga jemaat yang mampu menghadirkan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran GKE Betang Kahanjak dalam Membangun Kesadaran Politik Jemaat di Kota Palangka Raya: Tinjauan Teologi Politik, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

1. GKE Betang Kahanjak memahami politik sebagai bagian dari tanggung jawab orang percaya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Politik dipandang bukan sebagai sarana memperoleh kekuasaan, melainkan sebagai wujud tanggung jawab untuk menghadirkan nilai-nilai Kristiani seperti keadilan, kejujuran, kasih, dan kesejahteraan bersama, dengan tetap menolak praktik politik yang bertentangan dengan ajaran Kristen.
2. Peran GKE Betang Kahanjak dalam membangun kesadaran politik warga jemaat diwujudkan melalui pembinaan iman, khotbah, pelayanan pastoral, dan pendidikan etika Kristen. Gereja menjaga netralitas terhadap politik praktis, tetapi tetap mendorong jemaat untuk menggunakan hak politik secara bijaksana, bertanggung jawab, serta menjaga persatuan dan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan bermasyarakat.

B. SARAN-SARAN

1. Bagi GKE Betang Kahanjak

GKE Betang Kahanjak diharapkan terus memperkuat pembinaan mengenai hubungan antara iman Kristen dan kehidupan bermasyarakat, termasuk pemahaman mengenai tanggung jawab politik warga gereja. Pembinaan tersebut dapat dilakukan secara lebih terencana melalui seminar, diskusi, ataupun kegiatan pendidikan jemaat sehingga pemahaman politik warga jemaat tidak hanya berkembang menjelang pemilihan umum, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan iman yang berkelanjutan.

2. Bagi Warga Jemaat

Warga jemaat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran bahwa partisipasi politik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus wujud pengamalan iman Kristen dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menggunakan hak politiknya, jemaat diharapkan tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih, tanggung jawab, serta menghormati perbedaan pilihan politik sehingga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bergereja tetap terpelihara.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu gereja dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian pada lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, John. 1776. *Thoughts on Government*. Philadelphia: John Dunlap.
- Aritonang, Arthur. 2020. *Kebebasan Beragama dalam Pemikiran Andreas A. Yewangoe. The New Perspective in Theology and Religious Studies*, Vol. 1, No. 2, hlm. 34-49.
- _____. 2020. *Tanggapan Teologis Andreas A. Yewangoe Terhadap Otonomi Daerah di Indonesia pada Era Reformasi. Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, Vol. 2, No. 2, hlm. 45-60.
- Bangun, C. (2015). Teologi publik Stanley Hauerwas dan penerapannya dalam konteks di Indonesia. *Verbum Christi: Jurnal Teologi Reformed Injili*, 2(1), 155–170.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bellah, Robert N. 1967. *Civil religion in America. Daedalus*, Vol. 96, No. 1, hlm. 1-21.
- _____. 1975. *The Broken Covenant: American Civil religion in Time of Trial*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cavanaugh, William T. 2009. *The Myth of Religious Violence: Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, John W. 2013. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Los Angeles: SAGE Publications.
- Goh, Daniel & Holden, Philip. 2009. *Race and Multiculturalism in Malaysia and Singapore*. London: Routledge.
- Haryono, Yohanes T. 2022. *Teologi Politik dan Etika Sosial dalam Gereja. Jurnal Teologi Kontekstual*, Vol. 7, No. 1, hlm. 112.
- Intan, Benyamin F. 2006. *Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia*. New York: Peter Lang.
- Jawa, E. R. (2020). *Teologi politik menurut pandangan Johann Baptist Metz (Skripsi Sarjana)*. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere.

- Leksana, Dharma. 2017. *Etika Politik Kristen: Telaah Kontekstual di Indonesia*, Malang: Universitas Kristen Satya Wacana Press
- Malino, Yan. 2025. *Agama dan Etika Politik: Peran Gereja dalam Diskursus Etika Politik Era Reformasi*. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, Vol. 9, No. 2, hlm. 201-215.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ming, David. 2021. *Peranan Gereja dalam Sistem Pemerintahan yang Baik di Indonesia*. *Jurnal Kadesi*, Vol. 3, No. 2, hlm. 93.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- _____, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ngelow, Zakaria J. 2014. *Turut Membina Indonesia Sebagai Rumah Bersama – Peran Gereja dalam Politik di Indonesia*. *Jurnal Jaffray*, Vol. 12, No. 2, hlm. 214-228.
- Pasaribu, A. C., Sitepu, A. R., & Sembiring, V. K. B. (2023). Pendekatan kontekstualisasi Eropa (Peranan teologi Eropa, teologi pengharapan Jürgen Moltmann). *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 4(2), 45–58.
- Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). 2018. *Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama*. Jakarta: PGI.
- Priana, I Made. 2020. *Pemahaman dan Pemaknaan Pancasila Sebagai Agama Sipil Indonesia dalam Pelaksanaan Misi Agama-Agama*. *Jurnal Teologi dan Studi Agama*, Vol. 8, No. 1, hlm. 73-88.
- Salong, Denny J. 2021. *Gereja dan Negara dalam Perspektif Teologi Politik*. *Jurnal Filsafat & Teologi*, Vol. 15, No. 2, hlm. 189.
- Singgih, Emmanuel Gerrit. 2004. *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Tahamata, Marfan Ferdinanda & Supratikno, Agus. 2024. *Peran Politik Gereja dalam Tahun Politik 2024: Studi Kasus GKI Serpong. Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, Vol. 13, No. 2, hlm. 227-248.
- Titaley, John A. 2013. *Religiositas di Alinea Tiga: Pluralisme, Nasionalisme, dan Transformasi Agama-agama*. Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Walean, Jefrie. 2021. *Gereja dalam Keragaman dan Keharmonisan: Studi Sosioteologis Merawat Kerukunan Hidup Beragama. Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2, hlm. 145-160.
- Wiyono, Slamet. 2023. *Peran Gereja dalam Perpolitikan di Indonesia. Jurnal Teologi*, Vol. 9, No. 1, hlm. 45.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



